



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Universitas Lambung Mangkurat
Tahun 2026**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	25.5
2	Pengukuran Kinerja	30%	24.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20.5
Predikat		A	83.35

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

1. Perlu dilengkapi rekapitulasi Rencana SKP Pegawai yang mewakili seluruh jabatan dalam satuan kerja.
2. Belum ada data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
3. Belum ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
4. terdapat 6 (enam) indikator yang tidak tercapai pada triwulan II yaitu pada:
 - [IKU 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT);
 - [IKU 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat;
 - [IKU 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga;
 - [IKU 3.1] Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 Tanpa Kemiskinan, SDG 4 Pendidikan Berkualitas, SDG 17 Kemitraan, dan 2 dua SDGs lain sesuai keunggulan;
 - [IKU 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia SDM perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan nasional/daerah/industri;
 - [IKU 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L;

B. Pengukuran Kinerja

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja dan cara untuk mengukur setiap indikator yang ada tersedia, namun tidak tertuang dalam Dokumen Renstra Universitas Lambung Mangkurat 2025-2029;
2. Pimpinan tidak selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja (absensi RPK Januari, Februari, Maret, April, Juni);
3. satker telah memberikan Reward dan/atau Punishment, namun belum disusun Pedoman/Kriteria Penetapan reward dan punishment.
4. Belum ada data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5. Belum ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pimpinan tidak terlibat pada penyusunan Laporan Kinerja.
2. Belum ada data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
3. Belum ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Evaluasi AKIP tidak dilaksanakan oleh SDM yang telah mengikuti pelatihan/diklat SAKIP seluruhnya (hanya 5 tersertifikasi dari 22 tim)
2. Belum ada data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
3. Belum ada upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Agar dilengkapi rekapitulasi Rencana SKP Pegawai yang mewakili seluruh jabatan dalam satuan kerja.
2. Agar dilengkapi data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
3. Agar dilakukan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
4. Agar dievaluasi 6 (enam) indikator yang tidak tercapai pada triwulan II, untuk ditetapkan upaya perbaikan/percepatan pencapaian target diakhir Tahun. Yaitu pada:
 - [IKU 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT);
 - [IKU 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat;
 - [IKU 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga;
 - [IKU 3.1] Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 Tanpa Kemiskinan, SDG 4 Pendidikan Berkualitas, SDG 17 Kemitraan, dan 2 dua SDGs lain sesuai keunggulan;
 - [IKU 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia SDM perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan nasional/daerah/industri;
 - [IKU 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L;

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar Definisi Operasional Indikator Kinerja dan cara untuk mengukur setiap indikator dituangkan dalam Dokumen Renstra Universitas Lambung Mangkurat 2025-2029 (Revisi);
2. Agar pimpinan Unit Kerja dilibatkan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja ;
3. Agar disusun Pedoman/Kriteria Penetapan reward dan punishment.
4. Agar dilengkapi data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
5. Agar dilakukan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

C. Pelaporan Kinerja

1. Agar Pimpinan Unit Kerja terlibat pada penyusunan Laporan Kinerja.
2. Agar dilengkapi data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
3. Agar dilakukan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Agar seluruh anggota Tim Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh SDM yang telah mengikuti pelatihan/diklat SAKIP.
2. Agar dilengkapi data dukung LKE AKIP 5 tahun terakhir.
3. Agar dilakukan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.

Jakarta, 8 September 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I

Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**